

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Berkutat di Alat Pengukur

### Polusi Udara Memprihatinkan

JAKARTA - Meski sudah banyak ruang usaha penyebab pencemaran udara di DKI Jakarta yang ditertibkan tapi kualitas udara di ibu kota masih terus memprihatinkan. Anehnya, Pemprov DKI masih berkutat pada

pemetaan pengukuran udara.

Di 2020 saja, Dinas Lingkungan Hidup DKI menganggarkan Rp 5 miliar untuk pembelian satu komponen pengukur udara di Jakarta. Nantinya, sebanyak lima unit tambahan alat pengukur udara yang dibeli Pemprov DKI.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta Andono Warih mengatakan, pihaknya segera mengalokasikan tambahan biaya pembelian alat pengukur udara di 2020. Kini, masih ada delapan alat pengukur kualitas udara yang sudah terpasang. "Kita kan ada 13 juta an penduduk, jadi kebutuhan alatnya sebanyak 13 unit," kata dia, Rabu (2/10/2019) ■

Andono mengatakan, untuk memenuhi alat pengukuran juga sudah melewati beberapa riset. Karena itu, ada dua

pendekatan yang dilakukan. Pertama, berdasarkan jumlah penduduk, dan kedua menurut radius atau luas wilayah.

Padahal, untuk kebutuhan alat pengukuran luas wilayah DKI, kata Andono, sebanyak 25 alat yang mampu mengukur kualitas udara PM 2,5. Karena luas wilayahnya sampai 650 kilometer. "Karena dari situ kita bisa memetakan, mana yang masih bagus jadi bukan hanya satu. Kan ada tempat-tempat yang relatif bagus," kata dia.

Nantinya data yang didapatkan dari alat ukur udara akan terhubung dengan Jakarta Smart City milik DKI Jakarta. Sebelumnya, Andono mengatakan sekitar 75 persen kontribusi polusi udara di Jakarta berdasarkan dari transportasi.

Andono mengakui, sebelumnya Pemprov DKI juga sudah menge-

luarkan surat edaran terkait Instruksi Gubernur (Ingub) No 66/2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Dalam peraturan itu disebutkan, penanganan polusi tidak bisa dilakukan oleh satu dinas atau instansi.

Bahkan, dalam Ingub itu tertulis, telah memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengendalikan emisi dari kendaraan umum. Kendaraan umum yang berusia diatas 10 tahun dilarang beroperasi. Tak hanya itu, kendaraan pribadi pun akan dibatasi menjadi 10 tahun. Kebijakan itu rencananya akan dilakukan pada 2025.

Data Dinas Lingkungan Hidup

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Jakarta, kini terdapat penggunaan cerobong gas di Jakarta mencapai 114 industri, dengan kepemilikan cerobong asap sebanyak 1.231 unit. Untuk itu, terus melakukan pengawasan. Bahkan di tahun ini, tengah dilakukan pengukuran cerobong emisi Sumber Tidak Bergerak terhadap 90 kegiatan usaha.

Dia menambahkan, komponen yang diawasi adalah pemenuhan ketentuan spesifikasi teknis cerobong, baku mutu udara keluaran, kewajiban melakukan pengukuran secara mandiri emisi setiap enam bulan oleh industri bekerja sama dengan laboratorium lingkungan hidup terakreditasi, dan kewajiban melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Di sisi lain, DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk secepatnya menuntaskan persoalan pencemaran udara di ibu kota. Berbagai usulan telah dilontarkan oleh politisi Kebon Sirih.

Namun hingga kini, tidak kongkret. Bahkan, kian berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. "Jika kualitas udara sudah melebihi batas ambang kesehatan, maka kita harus memaksa gubernur untuk bagaimana mengatasi ini," ungkap Wa Ode Herlina, anggota DPRD DKI Jakarta kepada

INDOPOS di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemangku kepentingan terkait perlu menyikapi kondisi kualitas udara yang semakin memprihatinkan itu secara cepat agar tidak menimbulkan ancaman besar di sisi kesehatan.

Karena itu, sambung Herlina, dalam waktu dekat, unsur DPRD segera melakukan pertemuan dengan gubernur untuk mencari solusi dan jalan keluar terkait buruknya kualitas udara di ibu kota.

"Selama ini kita belum menyentuh masalah udara ya, sekarang sudah saatnya kita harus membahasnya, nanti setelah semua teman-teman selesai dan balik ke Jakarta akan kita coba bahas," tutur dia.

Ia memandang persoalan udara merupakan pekerjaan yang harus diselesaikan atau direspon cepat oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Bahkan, jika tidak mampu menanganinya gubernur harus mengganti posisi kepala dinas. "Jika SKPD tidak mampu menangani ini, harus diganti," tandas dia.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Wiliam Aditya Sarana menuturkan, Gubernur Anies Baswedan terlalu spontan

dengan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) No 66/2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Anies, sambung dia, seharusnya membuat kajian akedemik sebelum menerbitkan instruksi seperti itu. "Saya lebih percaya kalau dia mengundang beberapa kampus yang mengerti tentang polusi udara, membuat naskah kajian akademik baru dia membangun Ingub ini," kata William kepada INDOPOS, Rabu (2/10/2019).

William mencontohkan, instruksi tentang pembatasan kendaraan berusia di atas 10 tahun. Hal itu perlu ada kajian teknis yang lebih jelas. "Contohnya taksi, bagaimana dengan taksi di atas 10 tahun? Apakah itu termasuk? Nah itu harus dituntaskan dulu sebelum membuat Ingub," tambah dia.

Dari beberapa poin yang akan dilaksanakan Pemprov DKI untuk mengatasi masalah polusi udara, kata politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, solusi perluasan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganjil dan genap merupakan langkah yang benar.

"Kalau menurutku yang paling dekat itu betul ganjil genap itu salah satu (langkah, Red), hanya yang lainnya itu tunggu

kajian akademik dulu," ulas dia.

William menyatakan, tidak perlu waktu lama untuk menanti kajian akademik. Saat ini, ada beberapa kampus sudah menyelesaikan kajian bagaimana cara mengurangi polusi.

Sedangkan Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andriano menyatakan, pihaknya justru meminta Gubernur Anies Baswedan mempercepat pelaksanaan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronik sebagai bagian dari mengatasi pencemaran udara di ibu kota.

"Permasalahan dari polusi itu adalah dari transportasi, jalan berbayar adalah salah satu ERP yang kita sampaikan untuk dipercepat menyelesaikan solusi," tutur Wibi kepada INDOPOS, Rabu (2/10/2019).

Selain ERP, menurut Wibi, masih banyak kebijakan lain yang bisa dilakukan untuk menekan polusi udara. "Penyelesaian polusi bisa seperti green building yang bisa juga diterapkan. Toh, juga tadi pak gubernur menyampaikan, pada tahun 1970, beliau mendapatkan kliping bahwa Jakarta adalah salah satu kota yang memiliki tingkat polusi tertinggi di dunia. Masalah ini sudah lama, tapi baru terekspose sekarang," tegas dia. (dny/aen)